

Pengaruh Aspek Sosial Budaya Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

The Influence of Socio-Cultural Aspects on the Jointly Developed Village-Owned Enterprises of Maju Village and Wolotolo Village, Ende Regency, East Nusa Tenggara

Raymundus Lullus Rua Raki

Program Studi Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Indonesia

Diterima: 17 Oktober 2023; Direview: 20 Oktober 2023; Disetujui: 29 November 2023

*Corresponding Email: raymundusraki@stpmssantaursula.ac.id

Abstrak

Artikel berjudul Pengaruh Aspek Sosial Budaya Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh aspek sosial dan budaya dalam pembentukan, partisipasi ataupun pemilihan unit usaha, maupun perekrutan anggota BUMDes antara tahun 2016-2017. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana adat istiadat, tradisi dan nilai budaya menjadi basis dan berpengaruh pada proses pembentukan BUMDes. Penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dan Teori-Teori Modal Sosial. Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat memberikan pengaruh dalam pola kerja sama berdasarkan tradisi berkumpul bersama di desa, perekrutan pengurus yang dipengaruhi kebiasaan berdasarkan faktor kedekatan dan kekerabatan, serta pola kerja yang sangat dipengaruhi perkembangan kebiasaan masyarakat setempat menjadi sangat berorientasi pada dana. Hal ini kemudian membawa dampak positif seperti adanya loyalitas, namun di sisi lain terdapat juga banyak dampak negatif seperti rendahnya profesionalitas, skill dan kapasitas dari pengurus, tersisihnya pihak-pihak lain dari kepengurusan BUMDes, serta menjadikan pola kerja yang selalu melihat ketersediaan dana sebagai patokan penyelenggaraan kegiatan sehingga semua itu bermuara pada kemandekan kegiatan usaha yang ada pada BUMDes.

Kata Kunci: Sosial Budaya; Badan Usaha Milik Desa; Modal Sosial

Abstract

The article entitled *The Influence of Socio-Cultural Aspects on Village-Owned Enterprises (BUMDes) Maju Bersama Wolotolo Village, Ende Regency, East Nusa Tenggara* aims to examine the influence of social and cultural aspects in the formation, participation or selection of business units, as well as the recruitment of BUMDes members between 2016-2017. The focus of this research is to see how customs, traditions and cultural values become the basis and influence the formation process of BUMDes. This research utilizes Structural Functionalism and Social Capital theories. A qualitative approach is used in this research to collect and analyze data. Data were collected through interviews, observation and documentation. Based on the research, it was concluded that the traditions and customs of the local community influenced the pattern of cooperation based on the tradition of gathering together in the village, the recruitment of administrators who were influenced by customs based on closeness and kinship factors, and the pattern of work that was strongly influenced by the development of local community habits to be very fund-oriented. This then brings positive impacts such as loyalty, but on the other hand there are also many negative impacts such as the low professionalism, skills and capacity of the management, the exclusion of other parties from the management of the BUMDes, as well as making a work pattern that always sees the availability of funds as a benchmark for organizing activities so that all of that leads to the stagnation of business activities in the BUMDes.

Keywords: Socio-Culture; Badan Usaha Milik Desa; Social Capital

How to Cite: Raki, R.L.R., (2023), Pengaruh Aspek Sosial Budaya Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 1005-1016.



PENDAHULUAN

Sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran menjadi salah satu fokus pemerintah (Fitria, 2020). Untuk itu, desa menjadi fokus dan lokus utama pertumbuhan dan pembangunan dengan pemberian dana desa dengan berbagai ketentuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga kesejahteraan desa dapat tercapai karena desa mempunyai badan usaha sendiri.

Meskipun demikian, BUMDes masih membutuhkan sokongan aspek-aspek lain. Aspek-aspek itu adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sdm, aspek keuangan, aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan, aspek hukum (yuridis) (Suharyanto et al., 2014). Aspek-aspek ini turut menentukan arah dan keberlanjutan BUMDes sebagai bagian dari pemberdayaan kehidupan masyarakat (Eko & Tim, 2014).

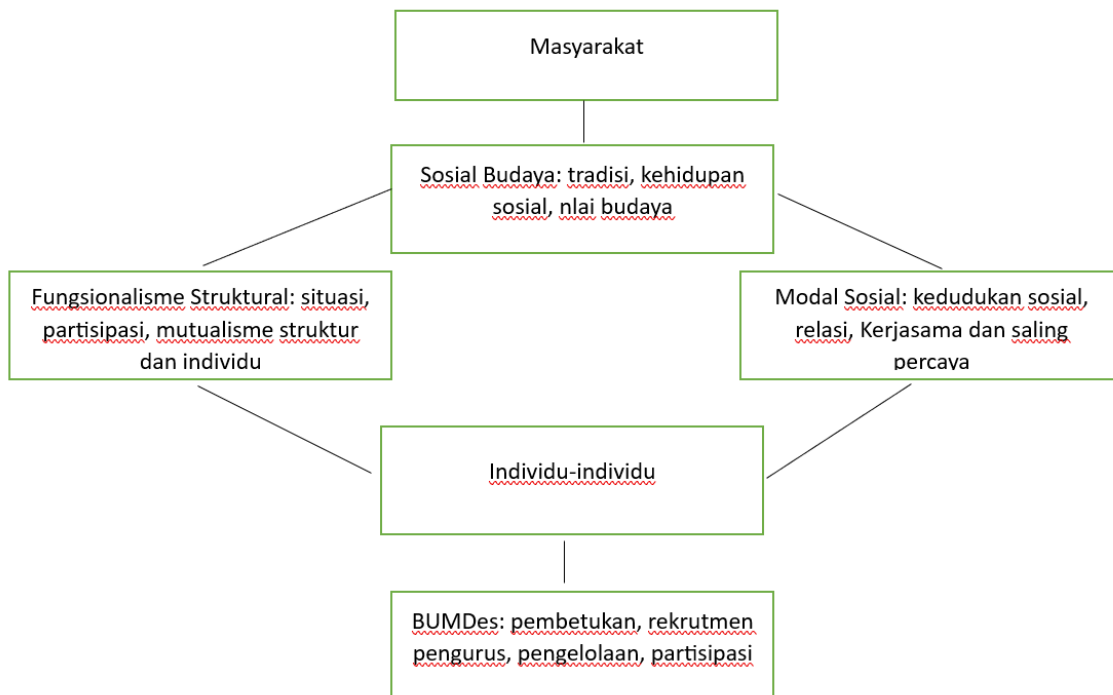
Meskipun demikian terdapat fakta lain yakni walaupun telah mendapatkan sokongan, keberadaan dan pengelolaan BUMDes tidak selalu berjalan mulus. Terdapat masalah-masalah seperti kurang baiknya manajemen BUMDes, modal bisnis yang macet, modal usaha yang tidak segera cair ataupun mental dan kehidupan sosial masyarakat yang belum siap untuk berwirausaha (Lengo, 2021; Saputra, 2021). Kondisi demikian turut dialami oleh BUMDes Maju Bersama di Desa Wolotolo yang dibentuk pada tahun 2016 ini akhirnya macet beroperasi pada tahun 2017.

Berkaitan dengan kondisi di atas, urgensi penelitian ini ialah pertama, BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberdayakan manusia karena kepengaturannya menekankan kemandirian dan pemberdayaan (Suharyanto et al., 2014). Di situ dibutuhkan kesiapan infrastruktur, sumberdaya manusia yang dipengaruhi mental dan pola hidup masyarakat setempat. Hal ini sangat menentukan apakah kemandirian yang dicita-citakan oleh pemberdayaan itu bisa terwujud atau tidak. Kedua, BUMDes juga merupakan lembaga yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Hal ini membuat BUMDes tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat, termasuk tradisi dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Ketiga, keberlangsungan dan keberlanjutan dari pengelolaan BUMDes itu sendiri sangat bergantung dari bagaimana adaptasi lembaga BUMDes dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Karena itu, tentunya pengaruh nilai dan tradisi budaya pada masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan dalam pengambilan keputusan untuk membentuk BUMDes, partisipasi ataupun pemilihan unit usaha, maupun perekrutan anggota.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori untuk melihat apa dan bagaimana pengaruh aspek sosial budaya pada BUMDes. Pertama, Teori Fungsional Struktural dari Talcot Parson, di mana individu memiliki kehendak dan kesadaran diri, namun dalam tindakannya individu juga memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai situasi sosial yang ada pada situasi sekitarnya, termasuk di dalam masyarakat. Perhitungan dan pertimbangan itu didapatkan dari pemahaman individu akan situasi di sekitarnya. Kondisi ini kemudian menciptakan partisipasi individu dalam struktur dan perilaku mutualisme antara struktur dan individu (King dalam Jarvie & Zamora-Bonilla, 2011).

Kedua, Teori Modal Sosial dari perspektif Michael Boudieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyama. Teori ini melihat bahwa kultur yang ada di dalam masyarakat punya pengaruh dalam membentuk individu dalam situasi sosial budaya di mana ia hidup (*embodied state*) yang juga termanifestasi dalam tindakan dan pekerjaannya setiap hari atau *objectified state* dalam bahasa Bourdieu (Lin, 2002). Selain itu, modal sosial hadir dalam bentuk sumberdaya yang dimiliki individu, baik itu secara aktual dan potensial dalam keterkaitannya dengan posisi kedudukan ini berada dalam jaringan masyarakat yang berkelanjutan pada institusi-institusi yang saling berelasi dan menyokong (Bourdieu dalam Richardson, 1986). Selanjutnya, Putnam melihat modal sosial ini nyata lingkaran kerjasama yang terbangun atas jejaring, norma dan sikap saling percaya. Ketiga hal ini membentuk rantai koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama (Putnam et al., 1993). Lebih jauh, Francis Fukuyama melihat bahwa kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara tidak hanya bertumpu pada majunya teknologi atau kayanya sumberdaya dari sebuah negara yang disokong oleh saling percaya, saling membantu dan kerjasama yang dibentuk dari norma dan etika

yang adalah produk dari sebuah budaya (Syahra, 2003). Landasan teori ini dipakai untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh sosial budaya (tradisi, kehidupan sosial, nilai) pada keberadaan BUMDes.



Gambar 1. Visualisasi Kerangka Konseptual.
Sumber: Penulis

BUMDes sudah ada sejak tahun 2004, dengan diterbitkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kemungkinan bagi desa untuk mendirikan BUMDes. Pendirian badan usaha ini disesuaikan dengan potensi desa guna untuk mawadahi aktivitas dan perekonomian masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020). Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan dengan penetapan PP Nomor 43 Tahun 2014, ditetapkanlah Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berkaitan dengan keberadaan BUMDes dan aspek sosial budaya, penelitian sebelumnya tentang BUMDes di Desa Landungsari, Malang oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo, menemukan bahwa BUMDes memang memiliki kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa. Meskipun demikian, penguatan ekonomi itu mesti didukung oleh kebersamaan dan kemandirian selain sokongan dana untuk keberlangsungan hidup BUMDes (Ramadana, 2013). Selain itu, penelitian dari Kustin Hartini, di Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepahiang menunjukkan hal serupa yakni BUMDes mesti mendukung kesehatan masyarakat, selain perubahan budaya dan demografi yang memunculkan kebiasaan baru seperti berkumpul untuk menentukan keputusan bersama dan perubahan komposisi tenaga kerja (Hartini, 2018). Selain itu, penelitian lain dari Aulia Tafhana Arindhawati & Evy Rahman Utami tentang BUMDes di Desa Ponggok, di Klaten, menunjukkan keterkaitan yang cukup erat antara BUMDes dan aspek sosial masyarakat di mana terdapat kontribusi BUMDes pada bidang sosial yang menyumbang bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Arindhawati & Utami, 2020).

Dalam spektrum yang lebih luas, keterkaitan antara aspek sosial kemasyarakatan cukup besar dalam kerja-kerja ekonomi, khususnya pada masyarakat Asia. Putnam dalam studinya menyimpulkan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia muncul juga karena tekanan akan pentingnya kerja sosial sehingga muncul seperti kapitalisme berjejaring (Putnam dalam Sutoro Eko, 2014). Meskipun demikian, ada permasalahan yang muncul di sekitar gerak pertumbuhan

ekonomi. Hal itu terlihat dalam studi yang dibuat oleh Edward Miguel, Paul Gertler, dan David I. Levine, yang menunjukkan bahwa aspek sosial dalam bentuk modal sosial pada masyarakat di desa-desa di Indonesia, tidak bisa secara efisien membuahkan dan menumbuhkan modal ekonomi (Miguel et al., 2005). Hal ini diperkuat oleh studi S. Eko pada 274 daerah industri di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial ternyata tidak bisa mempengaruhi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini pertumbuhan industri di desa itu (Sutoro Eko, 2014).

Apabila penelitian-penelitian sebelumnya tentang BUMDes menunjukkan bagaimana pengaruh BUMDes terhadap aspek sosial budaya, posisi penelitian ini mengambil alur terbalik yakni melihat bagaimana peran dan pengaruh aspek sosial dan budaya (tradisi, kehidupan sosial, kebiasaan, nilai budaya) dalam proses pembentukan dan perjalanan BUMDes Maju Bersama Desa Wolotolo, khususnya pada proses pembentukan dalam pengambilan keputusan untuk membentuk BUMDes, partisipasi ataupun pemilihan unit usaha, maupun perekrutan anggota, sejak awal pembentukan BUMDes sampai berhenti beraktivitas pada tahun 2017. Selain itu penelitian ini juga memperkaya spektrum pengaruh kondisi sosial budaya terhadap pertumbuhan ekonomi di level Asia dan di Indonesia dengan menyumbangkan keunikan pengaruh sosial budaya pada gerak pertumbuhan ekonomi lokal dan permasalahan yang hadir di sekitarnya.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh aspek sosial dan budaya (tradisi, kehidupan sosial, nilai budaya) dalam proses pembentukan dan perjalanan BUMDes Maju Bersama Desa Wolotolo. Hal ini amat berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk membentuk BUMDes, partisipasi ataupun pemilihan unit usaha, maupun perekrutan anggota antara tahun 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan eksplanatori. Fokus penelitian ini yakni aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat dan mereka yang terlibat dalam organisasi BUMDes. Epistemologi penelitian ialah deskripsi dan eksplanasi beberapa peristiwa dalam hal ini tindakan dan kondisi masyarakat yaitu (tradisi, kehidupan sosial, nilai budaya) beserta kondisi geografis sebagai sebuah studi kasus kolektif (Creswell & Poth, 2016). Hal itu dibuat melalui wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Subjek dalam penelitian ini ialah para informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan dalam proses pembentukan BUMDes dan pengaruh sosial budaya yang terjadi di sekitar pembentukan itu yaitu kepala desa, kepala BUMDes, KAUR desa, masyarakat desa. Pihak-pihak ini menjadi narasumber utama dan subjek yang diobservasi sebagai sumber data primer penelitian, sementara data sekunder diambil dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan dokumen pemerintah desa Wolotolo, BUMDes Maju Bersama dan dokumen yang berhubungan dengan tradisi dan budaya masyarakat desa di wilayah Ende-Lio atau masyarakat di Flores pada umumnya.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis dalam beberapa tahapan yakni: pertama, pengorganisasian data yakni mengorganisasikan dan menyortir data dari transkrip wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi berkaitan dengan pengaruh aspek sosial budaya (tradisi, kehidupan sosial, nilai budaya) pada BUMDes. Kedua, membaca dan membuat memo, yakni data dikategorisasi dalam frasa pendek, ide atau konsep berkaitan dengan kerangka konseptual yakni teori Fungsional Struktural dan Modal Sosial. Ketiga, mendeskripsi, menafsirkan dan mendistribusikan data menjadi kode dan tema, yakni mendeskripsikan secara lengkap dan detail tentang konteks kehidupan dan lingkungan, orang maupun peristiwa sesuai dengan tema yang diteliti. Setelah itu data di-*coding* untuk didistribusikan ke dalam sub-sub tema berkaitan dengan BUMDes yang membahas mengenai proses pendirian, perekrutan dan kepengaturan sampai berhenti beroperasi di tahun 2017. Distribusi ini juga berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat setempat yakni tradisi, kehidupan sosial dan nilai budaya, situasi kehidupan masyarakat setempat, kemudian uarian Keempat, penafsiran data, dilakukan dengan menghubungkan deskripsi dan distribusi data dalam tema-tema di atas yang dielaborasi berdasarkan teori teori Fungsional Struktural Parsons untuk melihat tindakan individu yang juga

memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai situasi sosial yang ada disekitarnya (Richardson, 1986) dan juga Teori Modal Sosial Michael Boudieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyama tentang kultur yang membentuk individu, kerjasama yang terbangun atas jejaring, norma dan sikap saling percaya (Putnam et al., 1993; Syahra, 2003). Hal ini dibuat untuk membentuk eksplanasi utuh tentang bagaimana pengaruh aspek sosial budaya mempengaruhi keberadaan BUMDes berdasarkan teori yang digunakan di dalam penelitian (Creswell & Poth, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Aspek Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Wolotolo Pada BUMDes Maju Bersama

Sejarah leluhur atau nenek moyang orang Wolotolo berawal dari Mamo Goro yang berasal dari Lepe Mbusu karena beliau adalah seorang pengembara (Weki, 2020). Beliau ialah orang pertama yang menempati wilayah itu yang berada di perbukitan dan memiliki penghuni (Pati, 2020). Tempat itu diberi nama *Wolo* (bukit) dan *Tolo* (melihat) dan bersama dengan saudara-saudaranya, Embu Bapu dan Embu Loke, Embu Ndosu, mereka menjadi mosalaki-mosalaki (pemimpin adat) pada Sa'ó Ria Tenda Bewa atau kampung yang baru dengan kelengkapannya yakni adanya altar dan mezbah atau dalam bahasa daerah disebut sebagai *Keda Tubu Kanga* (Tetiro, 2017). Salah satu tradisi yang konsisten dijalankan di kampung itu ialah tradisi *pire teu* (haram tikus). Tradisi ini dibuat sebelum memulai musim tanam. Kegiatan mencari udang di kali atau (*ngoka lowo nai nio*) mengawali kegiatan ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan upacara makan sirih pinang selama 4 malam oleh Embu Goro sebagai *Ata Pu' u*. Beliau pada siang hari, yakni hari pertama dan kedua, pergi mengecek kesiapan kebun, membersihkan dan istirahat. Pada hari ke 4, sebelum malam ada upacara makan sirih pinang beliau baru memilih bibit untuk ditanam, memberi sesajen dan mempersembahkan doa sehingga tanaman dijauhi dari hama dan bisa bertumbuh dengan subur (Tetiro, 2017).

Masyarakat Wolotolo hidup dalam ketaatan pada adat istiadat dan tradisi. Ketaatan itu bisa terwujud karena selain adat atau tradisi sudah menjadi kebiasaan komunal setiap hari, tetapi juga karena adat dan tradisi merupakan hal yang mengikat mereka. Kondisi ini menimbulkan resonansi kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan sosial budaya lain yang terus diulang sampai pada saat sekarang ini. Salah satu tradisi adat yang paling sering dijalankan dalam tradisi sosial budaya adalah kegiatan *minu ae petu* (minum air panas). Orang membuat kegiatan minum air panas ketika salah satu anggota masyarakat membutuhkan bantuan untuk melaksanakan hajatan tertentu. Dalam kegiatan ini, yang punya hajatan akan mengundang kerabat, kenalan atau masyarakat sekitar untuk berkumpul dan mengumpulkan bantuan (biasanya dalam bentuk uang).

Hal lain yang cukup mencolok di Wolotolo yakni meskipun masyarakatnya adalah petani sederhana, mereka selalu mempunyai dana untuk kegiatan adat dan menjadi sesuatu yang cukup diutamakan. Itu terjadi karena selain dana itu menentukan solidaritas antara sesama masyarakat, dana juga menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap orang atau keluarga bersangkutan akan keterlibatan dan marwah keluarga itu. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang pegawai di Kantor Desa yang juga adalah penduduk desa, ada kesan yang sangat kuat bahwa, penduduk desa akan lebih mempertimbangkan alasan kedua dari pada alasan yang pertama. Hal ini yang membuat mereka akan berusaha sedemikian rupa sehingga selalu ada uang untuk kegiatan-kegiatan itu. Besaran uang pun tidak mengikuti standar kemampuan ekonomi keluarga bersangkutan tetapi mengikuti standar atau kebiasaan yang sudah ada.

Di sini, kalau untuk kegiatan minu ae petu orang akan malu jika hanya membawa uang biru (Rp.50.000), karena semua orang paling rendah membawa uang merah (Rp.100.000) pada acara. Ini juga berlaku untuk acara pernikahan dan penerimaan komuni pertama atau sambut baru.

Baik kegiatan adat maupun tradisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjadi habitus masyarakat Wolotolo. Selain menjadi habitus, ia juga menjadi penentu eksistensi serta integrasi dari individu ataupun keluarga pada kelompok masyarakat setempat. Dengan kata lain, kehidupan orang Wolotolo memperoleh legitimasi pada keterlibatan dan keterikatan pada adat dan tradisi budaya pun tradisi sosial yang ada di sana.



Urgensitas BUMDes Untuk Masyarakat Desa Wolotolo

Desa Wolotolo merupakan salah satu desa pada Kecamatan Detusoko di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini resmi terbentuk sejak tahun 1960. **Sejak itu banyak program pemerintah yang masuk ke Desa seperti** Program ABRI Masuk Desa (AMD) tahun 1978, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993 dan yang paling akhir muncul di desa adalah program Karang Taruna dan Badan Usaha Desa (BUMDes). Berlandaskan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada bulan Februari tahun 2017, dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Desa Wolotolo yakni SK No.5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Wolotolo dalam pertemuan bersama pemerintah desa, Dinas BPMD Kabupaten Ende untuk sosialisasi sekaligus pembentukan BUMDes di desa Wolotolo.

Pertemuan itu kemudian menghasilkan keputusan dibentuknya BUMDes dengan nama BUMDes Maju Bersama-Wolotolo. Pengurus BUMDes dipilih langsung pada saat itu melalui sistem aklamasi. Ada pun pemilihan aklamasi dibuat berdasarkan pertimbangan pihak desa bahwa orang-orang yang dipilih mampu mengemban tugas yang dipercayakan. Selanjutnya, melalui keputusan bersama antara pihak desa dan pengurus BUMDes, disepakati usaha yang akan dijalankan ialah usaha mengadakan material bangunan yakni batu sehingga diadakanlah mesin pemecah batu (*stone cruiser*). Mesin ini diadakan dengan anggaran tahun 2017 dari dana desa. Selain itu, ada juga usaha *handtraktor* dan alat pengolah campuran semen untuk membantu masyarakat dalam memproduksi beras untuk dijual. Sementara alat pengolah semen yang disewakan bisa memberikan penghasilan untuk BUMDes atau mereka yang bekerja pada BUMDes.

Tradisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Wolotolo Sebagai Basis BUMDes Maju Bersama

Hidup secara komunal dalam tradisi dan peraturan bersama terformat ke dalam budaya yang menjadi ciri khas komunitas-komunitas adat masyarakat Flores. Pada masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Lio, termasuk masyarakat Desa Wolotolo. Hal ini terlihat dari berbagai cara mereka menjalani kehidupan termasuk dalam kebiasaan dan ritual adat sebagai ciri khas dan identitas yang melekat erat dan terus di bawa dan dipraktikan selama individu-individu di dalam masyarakat itu hidup.

Dalam konteks masyarakat Wolotolo, tradisi maupun peraturan itu bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Ia bisa mewujud dalam ketentuan adat seperti upacara yang mesti dibuat di waktu tertentu. Upacara ini bisa dibuat pada musim tanam atau musim panen. Tradisi maupun peraturan itu juga dapat mewujud dalam larangan untuk melakukan atau memakan jenis makanan tertentu yang dalam bahasa Lio disebut *pire*. Selain itu, peraturan dan tradisi juga bisa mewujud dalam bentuk upacara, cara berpakaian atau kebiasaan berkomunikasi, struktur jabatan atau juga kekerabatan di dalam masyarakat adat.

Identitas, peraturan dan tradisi ini menjadi semakin kuat, karena terus dipraktikan setiap hari. Praktik-praktik ini terus dibuat dengan alasan bahwa keberadaan praktik tradisi maupun peraturan ini akan menjaga keberlangsungan dan eksistensi sebuah masyarakat adat. Praktik tradisi, budaya atau peraturan itu, bahkan tidak hanya berkisar pada urusan adat. Urusan-urusan keagamaan atau pun urusan pemerintah kadang juga bercampur dengan praktik budaya, tradisi maupun peraturan adat. Kondisi ini membuat masyarakat sepertinya sulit untuk menarik demarkasi yang jelas antara urusan-urusan budaya dan keluarga dengan urusan profesionalitas di bidang pekerja. Bersangkut pautnya semua urusan itu menjadi basis yang melandasi kehidupan masyarakat. Selain itu, sangkut paut hal tadi juga menyatukan kehidupan masyarakat itu.

Salah satu contoh dari percampuran antara urusan sosial budaya dan urusan pekerjaan bisa dilihat dalam jejaringan kerja atau profesi. Dalam masyarakat yang kuat ikatan sosial dan kekeluargaannya, urusan pekerjaan juga dicampur dengan urusan keluarga. Dalam perekrutan misalnya, sang perekrut akan cenderung memilih subjek atau orang yang memiliki ikatan kekeluargaan atau pertalian sosial seperti persahabatan. Pertimbangan ini akan sangat dominan

ketimbangan pertimbangan kompetensi dan profesionalitas. Sikap dan laku ini pula yang turut menjadi faktor yang mempersatukan masyarakat.

Selain itu, perubahan waktu dan perkembangan masa dengan bobot perkembangan ilmu dan teknologi kemudian mempengaruhi perkembangan paradigma berpikir. Manusia modern dan post-modern seringkali punya prespektif yang berberda tentang aspek tradisi, sosial budaya maupun peraturan-peraturan di masyarakat termasuk peraturan adat. Prespektif dan paradigma berpikir yang berbeda itu membuat beberapa pegerseran dalam hidup bersama. Masyarakat adat ataupun mereka yang berdiam di desa-desa turut mendapat imbasnya Hal yang cukup nampak dalam perubahan itu ialah bagaimana urusan-urusan negara masuk ke dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini kemudian membuat paradigma pemahaman dan berpikir masyarakat bukan lagi sebatas urusan-urusan adat dan kampung. Masyarakat kemudian dilibatkan dan diikuti dalam urusan-urusan administratif dan politik negara. Mereka dilibatkan dalam program-program kerja yang diadakan negara, entah itu di level kabupaten, kecamatan maupun di level desa.

Kondisi tadi kemudian membawa efek yang berbeda bagi masyarakat. Di satu sisi, urusan administrasi dan politik yang mewujud dalam program-program negara bisa membantu kehidupan masyarakat, seperti peningkatan ekonomi. Namun di sisi lain, masifnya program-program itu, dengan kucuran dana yang juga tidak sedikit, membuat pandangan masyarakat menjadi berubah. Perubahan itu bisa dilihat dari kebersamaan di masyarakat senantiasa diukur dengan dasar apakah ada atau tidak dana di dalam kegiatan itu. Hal ini juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jika kegiatan sosial itu diinisiasi oleh pihak pemerintah, maka keterlibatan masyarakat akan sangat bergantung pada ketersediaan dana di dalam kegiatan itu. Dalam konteks masyarakat Desa Wolotolo, jika ada dana, orang dengan serta merta akan terlibat, meskipun keaktifan dan efektifitasnya belum tentu baik. Sementara jika kegiatan itu tidak punya dana, maka sangat minim keterlibatan masyarakat. Kondisi seperti ini juga terjadi pada program-program pemerintah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan ini, biasanya banyak orang yang terlibat karena ada dana yang akan diberikan. Namun pengelolaan kegiatan itu akan hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Di sini, pengaruh aspek sosial budaya atau aspek kekeluargaan seperti yang dijelaskan terlihat. Dalam menjalankan program-program ini, orang-orang akan menunjukan petugas yang memiliki ikatan kekeluargaan (entah itu jauh atau dekat) atau pertemanan.

Kebudayaan, Tradisi, Nilai-Nilai dan Pengaruhnya Untuk BUMDes

Kuatnya pengaruh aspek-aspek kehidupan harian, yang termasuk aspek sosial budaya, yang terangkum dalam kebudayaan, tradisi atau nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat tidak pernah berdiri sendiri. Jika dilihat lebih jauh, hal itu tersangkut paut dengan jejaring kehidupan sosial yang muncul dalam bentuk modal sosial. Dikatakan demikian karena konsep modal sosial itu sendiri yang menekankan bagaimana relasi yang terbentuk antara manusia sebagai makhluk sosial tidak terbentuk dalam ruang yang kosong. Dalam bahasa Bourdieu modal sosial bertumpu pada kondisi aktual dan potensial individu dalam hal posisi dan kedudukan orang itu di dalam masyarakat. Dengan posisi dan kedudukan dengan level dan fungsi tertentu menjadi daya tawar bagi seseorang untuk membentuk relasi dan jejaringan hubungan sosial di dalam masyarakat. Posisi dan kedudukan itu akan semakin kuat dengan modal ekonomi sebagai simbol yang menegaskan kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat.

Keberadaan modal sosial dengan berbagai atribut yang melekat padanya akan sangat berpengaruh pada segala bentuk tindakan dan sikap yang diambil oleh seseorang. Hal itu bisa terlihat secara jelas dalam kondisi kepengaturan BUMDes yang ada di desa Wolotolo. Bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pemimpin desa, dalam hal ini kepala desa, secara sadar maupun tidak sadar akan terbawa dalam praktik realisasi tugas sebagai seorang pemimpin desa atau kepala desa. Hal itu bisa terlihat pada bagaimana pengaturan kepengaturan BUMDes.

Selain itu, kondisi berpengaruhnya modal sosial sangat didukung oleh struktur sosial atau sistem sosial yang telah ada di dalam masyarakat. Bahwa struktur atau sistem sosial yang telah

melekat pada pribadi-pribadi yang diimitasi dan dipelajari serta dipraktikan di dalam kelompok masyarakat akan terbawa pada ruang-ruang aktivitasnya yang lain termasuk di dalam dunia kerja. Hal ini bisa terlihat pada kondisi umumnya di lingkup adat masyarakat Lio, di mana seorang pemimpin memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin hampir pasti selalu diikuti oleh orang yang dipimpin. Hal ini bisa dilihat dalam kasus bagaimana seorang *Mosalaki* (pemimpin adat) seringkali dipatuhi keputusannya oleh anggota masyarakat. Model struktur sosial atau sistem sosial yang demikian juga terbawa dalam proses kepengaturan lembaga pemerintahan desa. Pemimpin di desa, dalam hal ini kepala desa, memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu yang hampir pasti akan disetujui orang-orang desa. Beberapa hal ini bisa dilihat dalam uraian berikut.

Pertama, hidup bersama dalam masyarakat adat menandakan adanya ikatan yang kuat antara setiap anggota kelompok masyarakat. Ikatan-ikatan ini terlihat dalam kait mengait dalam berbagai urusan kehidupan. Yang termasuk di dalamnya ialah urusan adat, urusan sosial sampai dengan urusan ekonomi. Keterkaitan ini pun juga membuat berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau orang per orang turut mempengaruhi pihak lain yang hidup dalam masyarakat yang sama sehingga mengharuskan pertimbangan yang baik, apabila ada kegiatan atau tindakan yang akan diambil di dalam masyarakat itu. Hal ini mensyaratkan adanya momen duduk bersama. Kegiatan duduk bersama bisa dalam konteks sebagai rapat atau diskusi adat atau diskusi-diskusi masyarakat bersama. Entah apa pun namanya, kegiatan duduk, berembuk untuk membicarakan urusan bersama, telah menjadi ciri khas masyarakat adat Lio, khususnya di Desa Wolotolo.

Meskipun tidak sempurna sekali, proses perancangan dan pembentukan BUMDes, juga melalui tahapan duduk bersama ini. Hal ini menunjukkan pengaruh sistem atau struktur sosial yang melekat telah pada masyarakat adat di suatu wilayah juga diterapkan ketika ada pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa. Bahwa kegiatan atau tindakan yang akan memberikan dampak pada kehidupan bersama seperti dalam keputusan atau kegiatan adat, juga diimitasi dalam ranah pemerintahan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan atau hal ini urusan-urusan administrasi desa, tidak bisa dilepaspisahkan dengan struktur sosial dan sistem sosial masyarakat di daerah tertentu. Dalam kaitan dengan Teori Fungsionalisme Struktural Parsons, hal proses untuk duduk bersama ini menunjukkan bagaimana individu pengurus pembentukan BUMDes mengikuti pola situasi sosial masyarakat yang selalu menempatkan proses duduk bersama sebagaimana dalam budaya setempat untuk memperoleh partisipasi masyarakat sehingga terdapat mutualisme struktur yang adat yang sudah ada di dalam masyarakat untuk mendukung pembentukan BUMDes.

Selain itu, Kondisi ini juga cukup menguatkan tesis dari Fukuyama tentang bagaimana faktor kebiasaan dan budaya tradisional juga berpengaruh bagi lingkaran kerjasama yang dalam konteks ini kerjasama untuk membentuk BUMDes. Bahwa di sana ada nilai-nilai tradisi, seperti duduk bicara bersama, atau tanggungjawab moral seorang pemimpin yang memiliki kewajiban bagi masyarakat. Hal-hal ini mesti dibuat, meskipun pada kenyataannya masih dalam level minimal, untuk bisa menjamin berjalannya kerjasama termasuk di dalam dunia kerja.

Lebih jauh, kegiatan ini tidak akan muncul apabila tidak dilandasi beberapa pertimbangan. Pertimbangan itu bisa muncul dalam rasa bahwa hal yang dibahas adalah mengenai kepentingan bersama. Atau pertimbangan lain ialah rasa saling percaya (*trust*) antara sesama anggota masyarakat. Perasaan saling percaya ini yang kemudian menjadi salah satu basis bagi terciptanya diskusi, saling mendengarkan atau saling menghormati di dalam sesama anggota masyarakat. Dengan rasa saling percaya, keputusan bersama bisa dicapai berdasarkan pertimbangan bahwa keputusan bersama berintensi untuk kebaikan bersama. Model tindakan seperti ini yang paling kurang mempengaruhi pembentukan BUMDes. Bahwa adanya situasi di mana pengurus desa bersama masyarakat dan orang dari Dinas BPDes duduk bersama untuk membicarakan tentang pembentukan BUMDes. Kegiatan duduk bersama ini bukan menjadi hal baru di desa. Pola diskusi yang sudah sering diterapkan di desa atau dalam kehidupan kampung adat diterapkan juga dalam

kepengaturan BUMDes. Meskipun tidak sempurna sama sekali namun paling kurang model berkumpul dan bicara bersama terjadi di dalam pembentukan BUMDes Maju Bersama.

Kedua, hubungan kekeluargaan maupun pertemanan juga menguatkan rasa saling terkait dan rasa saling percaya. Hal ini bisa dilihat ketika jalinan kekerabatan dan pertemanan sebagaimana yang dibicarakan di dalam teori modal sosial, turut berpengaruh kuat dalam membantuk jejaringan kehidupan termasuk jejaringan kerja. Pembentukan ini jejaringan itu akan semakin mantap ketika ada rasa saling percaya (*trust*) yang menjadi dasar sekaligus memperkuat relasi yang mendorong berjalannya kegiatan-kegiatan bersama. Kuatnya pengaruh relasi, baik dalam bentuk pertemanan maupun keluarga turut disokong oleh kondisi individu-individu yang sebenarnya merupakan hasil cetakan dari sistem sosial atau struktur sosial adat yang berlaku di wilayah adat tertentu, termasuk pada masyarakat Lio di Desa Wolotolo. Bahwa struktur atau sistem sosial yang telah melekat pada pribadi-pribadi yang diimitasi dan dipelajari selama orang itu hidup di dalam lingkaran masyarakat Desa Wolotolo. Hal-hal tadi lalu terbawa pada ruang-ruang aktivitas hidup harian termasuk di dalam dunia kerja. Seorang pemimpin memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin hampir pasti selalu diikuti oleh orang yang dipimpin. Hal ini bisa dilihat dalam kasus bagaimana seorang Mosalaki (pemimpin adat) pada masyarakat Lio seringkali dipatuhi keputusannya oleh anggota masyarakat.

Kondisi tadi, baik itu yang berhubungan dengan modal sosial maupun struktur sosial juga terbawa dalam dunia kerja. Jejaringan kekerabatan dan persahabatan ditambah dengan rasa saling percaya amat dominan ketika seseorang memilih orang yang akan diajak kerjasama. Pertimbangannya jelas, bahwa hubungan baik itu kekerabatan atau persahabatan bisa menjadi daya dorong bagi orang-orang itu bisa bekerjasama. Hal ini semakin didukung dengan praktik di dalam struktur sosial atau sistem sosial di level masyarakat desa, di mana ada kecenderungan orang mengikuti pihak-pihak yang punya kedudukan di dalam masyarakat. Hal ini lalu menciptakan proses seleksi pada perekrutan pekerja di BUMDes yang agak berbeda dengan proses seleksi pekerja konvensional. Proses seleksi pekerja yang konvensional biasanya kompetensi dan profesionalitas dari para calon pekerja. Sementara yang terjadi pada konteks BUMDes Maju Bersama di Desa Wolotolo terlihat bahwa seleksi yang dibuat berdasarkan kedekatan dengan pihak desa dan ditentukan oleh siapa yang memimpin di desa. Kondisi ini yang kemudian mempengaruhi kinerja mereka yang bekerja pada BUMDes.

Selain itu, kentarnya pengaruh modal sosial dalam rekrutmen pekerja bisa dilihat di dalam konteks ini. Bahwa modal sosial yang dimiliki oleh orang yang merekrut atau pihak yang terekrut sangat menentukan. Ikatan sosial baik ikut karena kondisi ekonomi atau status sosial dari perekrut dan yang merekrut turut berpengaruh kuat dalam penentuan siapa yang akan menjadi pengurus BUMDes. Dalam konteks BUMDes Wolotolo, modal sosial dengan berbagai atribut ekonomi atau kekuasaan atau jejaringan kekerabatan yang dimiliki oleh seseorang yang dalam hal ini ialah kepala desa menjadi daya dorong yang dominan untuk menetapkan beberapa orang untuk duduk dalam kepengurusan BUMDes di Wolotolo.

Akibatnya adalah kurang adanya seleksi yang mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi serta profesionalitas dari pekerja juga membuat kinerja yang tidak prima dalam pengelolaan BUMDes. Hal itu bisa terlihat dalam kinerja kepengurusan yang tidak berjalan dengan baik. Faktanya terlihat dalam keaktifan pengurus BUMDes yang hingga kini hanya diurus oleh satu orang saja, yakni ketua BUMDes. Meskipun demikian, kondisi ini juga membawa keuntungan. Dengan hubungan yang lebih erat, entah itu karena ikatan kerabat atau sahabat bisa membuat pengurus menjadi lebih loyal dan lebih serius dalam pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena ikatan sosial ataupun respek sosial yang ada antara pihak yang merekrut atau yang direkrut menjadi basis pengelolaan pekerjaan. Hal itu menunjukkan bagaimana efektivitas jaringan dan kerjasama turut ditentukan oleh faktor kebiasaan dan budaya tradisional. Hal ini senada yang ditegaskan oleh Fukuyama bahwa selain perhitungan rasional atau ekonomi, ada pula tradisi, nilai-nilai resiprositas bisa menjamin berjalan atau tidaknya kerjasama di dalam masyarakat termasuk di dalam dunia kerja. Mereka yang dipilih karena faktor relasi kedekatan dan kekeluargaan yang



seperti yang telah terjadi di dalam lingkaran budaya akan memberikan loyalitas dan kesetiaan pada orang yang telah memilih. Dalam hal ini, ada nilai-nilai resiprositas yang kemudian akan muncul.

Ketiga, sebagaimana yang sudah digambarkan sebelumnya bahwa, meskipun di satu pihak ada banyak hal yang menyangkut tradisi atau adat istiadat dan budaya yang terus dijalankan, namun perkembangan dunia dan waktu telah membuat beberapa pergeseran menyangkut perubahan paradigma berpikir dan sedikit menyentuh model kehidupan masyarakat di kampung Wolotolo. Pergeseran itu bisa dilihat dalam pola pikir dan tindakan berdasarkan keuntungan ekonomi atau *money oriented*, khususnya dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam hal ini desa.

Bahwa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan adat yang bersandar pada aspek kekuatan ekonomi, turut berpengaruh pada pola pikir bahwa tindakan-tindakan yang dibuat kadang diukur oleh seberapa duit yang didonasikan atau yang dikontribusikan pada pihak tertentu. Sebagaimana yang sudah diakui oleh mereka bahwa di masa ini, uang telah menjadi standar gengsi atau standar kehormatan orang, kemudian berefek pada pola pikir yang melekatkan standar-standar kehidupan atau kegiatan berdasarkan kekuatan ekonomi atau seberapa besar uang yang tersedia. Imbas yang secara sadar atau tidak sadar muncul kecenderungan pada masyarakat Desa Wolotolo untuk mengukur, terlibat atau menilai setiap kegiatan, khususnya kegiatan pemerintah berdasarkan seberapa dana yang bisa diserap untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga terjadi pada pengelolaan BUMDes, di mana prinsipnya pengelolaan BUMDes memang menyertakan dana untuk segala kegiatannya. Namun sebagaimana regulasi BUMDes, dana-dana itu bukanlah untuk dibagikan kepada semua masyarakat. Dana-dana ini akan dikelola untuk menghasilkan laba. Laba itu akan dibagikan baik untuk BUMDes maupun untuk pemerintah desa. Kondisi ini yang membuat penyerapan dana yang langsung untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu hampir tidak mungkin terjadi di dalam mekanisme kepengaturan BUMDes.

Kondisi demikian membuat tidak banyak orang yang mau terlibat dalam mengelola BUMDes karena pola pikir yang ingin selalu mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi tidak terjadi pada mekanisme kerja BUMDes. Keterlibatan yang dimaksudkan ialah keterlibatan baik sebagai pengurus inti ataupun pihak-pihak yang mendukung kinerja BUMDes. Orang di Desa Wolotolo sering berpikir bahwa keterlibatan di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa, mesti paling kurang memberikan kontribusi ekonomi, dalam hal ini mendapatkan dana. Hal tadi yang paling kurang membuat pengelolaan BUMDes tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh kondisi yang cukup menggambarkan situasi ini adalah situasi di mana mandeknya kegiatan BUMDes karena dana tahap pertama ialah untuk membeli alat, sementara dana tahap kedua ialah untuk menutupi biaya-biaya yang tidak selesai pada tahap pertama karena tidak ada keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes karena pengaruh kebiasaan atau pandangan sosial baru di masyarakat, bahwa orang hanya akan bekerja jika ada dana atau uang. Ini menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bagaimana perubahan paradigma berpikir masyarakat desa.

SIMPULAN

Budaya sudah sekian lama menjadi entitas yang melekat amat erat dengan manusia. Sejak manusia ada, manusia kemudian membentuk kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Itu terjadi karena manusia tumbuh, berkembang dan terus hidup dalam budaya. Hal ini membuat budaya cukup besar kekuatannya membentuk dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh kebudayaan pada kehidupan manusia merambah sampai ke dunia kerja. Banyak hal dalam kebudayaan yang mempengaruhi pola kerja, mulai dari kapan biasanya orang di suatu tempat mulai berkerja sampai dengan etos kerja sebuah masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Pengaruh budaya pada bidang kerja manusia juga ada di BUMDes Maju Bersama di Wolotolo sebagaimana yang sudah digambarkan dalam urian pada bab-bab sebelumnya.

Beberapa pengaruh terlihat jelas dengan bagaimana pola kerjasama dalam membentuk BUMDes seperti proses berkumpul bersama yang juga sekaligus menunjukkan bagaimana individu bekerja dalam situasi sosial dan menciptakan mutualisme antara struktur adat untuk membentuk

struktur dalam BUMDes sehingga terbentuk partisipasi masyarakat. Selain itu, pola perekrutan rekan kerja di dalam BUMDes yang sangat dipengaruhi oleh kedekatan baik itu menurut hubungan kekerabatan maupun persahabatan yang mengesampingkan kapasitas dan profesionalitas. Hal yang lain adalah pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang timbul akibat perkembangan zaman, seperti pola menghitung segala sesuatu dengan uang juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan dari BUMDes. Hal itu sebenarnya amat berkaitan karena faktor kebersamaan dalam masyarakat adat, termasuk tradisi berkumpul bersama atau hidup bersama terus memupuk kedekatan antara individu-individu yang ada di dalam kelompok masyarakat itu. Kondisi ini pada gilirannya membuka peluang bagi munculnya kecenderungan untuk memilih rekan kerja yang lebih berdasarkan pertimbangan kedekatan. Situasi ini tidak memberikan opsi pada kapasitas maupun profesionalitas dari seseorang karena terdapat pilihan bahwa orang bisa menggunakan sumberdaya yang ada di depan mata.

Hal ini bisa terjadi karena modal sosial yang dimiliki oleh sang pemilih atau penentu rekan kerja. Pada sisi lain, dengan memilih rekan kerja berdasarkan hubungan kekerabatan atau persahabatan semakin memperkuat modal sosial yang ada, yakni membentuk jejaringan sosial karena perasaan berjasa dari pihak yang dipilih oleh pihak yang memilih. Situasi yang demikian di satu sisi bisa menguntungkan karena akan memperbesar loyalitas dari pihak yang direkrut. Namun pada sisi lain, situasi ini juga bisa menciptakan garis batas antara mereka yang dipilih yang mereka yang tidak dipilih. Pada konteks ini ada gambaran bahwa di satu sisi modal sosial yang melandasi proses kerja maupun kinerja dari pengurus BUMDes dalam artian adanya kedekatan berdasarkan kekerabatan dan kekeluargaan bisa membantu dalam menjalankan kerja-kerja yang ada di BUMDes. Namun pada sisi lain hal ini bisa menimbulkan sisi negatif yang berefek pada kemandekan BUMDes. Hal itu terjadi karena seleksi rekan kerja di BUMDes yang berdasarkan kedekatan itu tidak diikuti dengan skill atau pun kapabilitas yang terdapat pada pengurus BUMDes itu sendiri. Ketidakmampuan ini akhirnya berdampak pada pengelolaan BUMDes yang belum bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan yang belum baik atau yang belum efektif dan efisien ini seterusnya berdampak pada kemandekan operasi BUMDes.

Lebih jauh, pemilihan berdasarkan faktor kedekatan atau kekerabatan secara sadar atau tidak membentuk lingkaran kerja yang sedikit eksklusif. Lingkaran kerja yang demikian secara tidak langsung bisa meminimalisir bahkan mengeliminasi keterlibatan pihak-pihak lain. Dengan begitu, hal yang bisa mengerti ialah minimnya keterlibatan anggota masyarakat lain dalam kegiatan-kegiatan BUMDes. Hal ini yang kemudian jadi salah satu penyebab mengapa BUMDes menjadi macet. Kondisi ini pada gilirannya menimbulkan rasa disisihkan bagi mereka yang tidak dipilih. Kepengaturan yang demikian dan perasaan disisihkan pada gilirannya membuat orang hanya terlibat di dalam kegiatan BUMDes, jika terdapat dana yang bisa mereka dapat atau dana stimulan pada kegiatan BUMDes. Hal ini juga yang membuat tidak banyak warga berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Dengan begitu, fakta yang bisa diterima ialah BUMDes hanya bisa berjalan ketika terdapat dana untuk menjalankannya. Ketika dana sudah tidak ada, BUMDes seperti mati suri, ada pengurus tetapi program-program di dalam BUMDes tidak berjalan. Karena keaktifan pihak-pihak yang terlibat di BUMDes, termasuk masyarakat desa hanya bisa ada kalau ada dana stimulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, Aulia Tafhana & Utami, Evy Rahman. 2020. Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten), *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. 4 (1): 43-55
- Bourdieu, Pierre. 1986. *The Forms of Capital, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by J. G. Richardson. New York: Greenwood Press
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, London: Sage Publications.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Memabangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD): Yogyakarta



- Field, John. 2004. *Social Capital*. Routledge: London & New York
- Fitria. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Adl Islamic Economic*. 1 (1): 13-28
- Hartini, Kustin. 2018. Identifikasi Kelayakan Usaha BUMDes Pada Aspek Sosial Dan Ekonomi: Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Mandiri Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*.3 (2): 50-64.
- King, A. 2011. *Functionalism And Structuralism; The SAGE Handbook Of The Philosophy Of Social Sciences*. New York: SAGE Publications Ltd.
- Lengo, Bartholy A.S, 2021, Implementasi Kebijakan Pendirian Bumdes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (5): 902-913
- Lin, N, 2001, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press
- Miguel, Edward., Gertler, Paul., Levine, David I, 2005. *Does Social Capital Promote Industrialization? Evidence From a Rapid Industrializer*. *The Review of Economics and Statistics*, 87(4): 754-762
- Putnam, R. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Pati, Yakobus, 2020, Mantra Di Desa Wolotolo, Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, *Jurnal Retorika*, 1(2): 126-133
- Ramadana, Coristya Berlian., Ribawanto., Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa: Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.1 (6): 1068-1076
- Syakra, Rusdy, 2020, Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, (1): 1-22
- Saputra, Fidentus Didakus Darma, 2021, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bumdes Dile Dalam Pengelolaan Unit-Unit Usaha, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6 (7):3200-3214
- Suharyanto & Hastowiyono. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha BUMDes*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD): Yogyakarta
- Tetiro, Agustinus, 2017. Masyarakat Adat Wolotolo dan Pire Te'u. Diunduh di <https://agustinustetiro.wordpress.com/2017/10/14/masyarakat-adat-wolotolo-dan-pire-teu/> tanggal 6 Juni 2021
- Weki, A. (2020), Makna Tubumusu Keda Kanga Di Wilayah Ulayat Adat Liowolotolo Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Menggereja Di Paroki Kristus Raja Wolotolo, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Sikka.